

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan, rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan Kepala Daerah wajib membuat laporan keterangan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya selama satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami dengan senang hati menerima segala saran dan pendapat dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini di masa mendatang. Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kita selama ini. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2023

KEPALA SATUAN,



MUH.KUSRI, SP

NIP. 19690315 199803 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I	Pendahuluan
1.1.	Dasar Hukum..... 1
1.2.	Visi dan Misi Kepala Daerah..... 2
1.3.	Data Umum Satpol dan Damkar..... 2
1.4	Jumlah PNS..... 6
1.5	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan..... 6
1.6	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja..... 6
1.7	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan..... 7
Bab II	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
2.1	Penjabaran APBD dalam Rangka Pencapaian Target Tahun 2023..... 8
Bab III	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah
3.1.	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan..... 14
3.2.	Kebijakan Stretegis yang Ditetapkan 25
3.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya..... 26
Bab IV	Penutup..... 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Koodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu “Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”: Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual Dan Sinergi.

2. Misi

Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ada 5 (lima) yaitu:

- 1) Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
- 2) Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
- 3) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
- 5) Membangun sinergisitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam hal ini mengampu misi ke-3 dan ke-5.

1.3 Data Umum Satpol PP dan Damkar

Kecamatan berdasarkan karakteristik geografis dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kecamatan yang berada di tepi laut di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung,

Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Sementara itu, kecamatan yang tidak memiliki wilayah laut adalah Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Batu Ampar.

Secara keseluruhan terdapat 11 Kecamatan dengan 135 desa dan kelurahan (kondisi hingga akhir tahun 2023). Wilayah yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari adalah 15 desa dan 5 kelurahan, Kecamatan Bati-Bati sebanyak 14 desa, Kecamatan Batu Ampar sebanyak 14 desa, dan Kecamatan Kintap sebanyak 14 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bajuin dengan jumlah masing-masing 9 desa.

Tabel 1.3.1
Rincian jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan
di Kabupaten Tanah Laut

No	Kecamatan	Ibukota	Desa	Kelurahan
1.	Jorong	Jorong	11	-
2.	Kintap	Kintapura	14	-
3.	Batu Ampar	Batu Ampar	14	-
4.	Panyipatan	Panyipatan	10	-
5.	Pelaihari	Pelaihari	15	5
6.	Bajuin	Bajuin	9	-
7.	Takisung	Gunung Makmur	12	-
8.	Bati-Bati	Padang	14	-
9.	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	-
10.	Kurau	Padang Luas	11	-
11.	Bumi Makmur	Handil babirik	11	-
	Kabupaten Tanah Laut		130	5

Sumber: Kasi Perlindungan Masyarakat tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam Kepala Daerah mendukung melaksanakan pelaksanaan tugasnya menegakkan Peraturan Daerah mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten / Kota. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah memiliki kontribusi yang sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah dengan menciptakan pemerintahan yang baik dalam ranah penegakan peraturan daerah.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran utama dalam memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat bekerjasama dengan Polri dan TNI dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, sehingga dapat terwujud kondisi yang didambakan oleh masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat pada dasarnya merupakan masalah yang sangat serius, apabila tidak dijaga dan dipelihara dengan baik maka akan menimbulkan masalah / problem di masyarakat. Penyebab permasalahan yang timbul diakibatkan oleh kurangnya pengawasan. Kondisi tersebut membuat peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Stakeholder harus proaktif. Sinergisitas bersama stakeholder perlu ditingkatkan sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan yang lainnya. Sinergi terjadi ketika berbagai bagian organisasi berinteraksi untuk menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada efek masing-masing bagian sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman selama beraktivitas sehari-hari.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah di bantu oleh Seksi Penyidikan dan Penyelidikan dan Seksi Pembinaan and Penyuluhan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga perlu menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan SOP yang berlaku.

Dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, membantu upaya pertahanan negara.

Adapun kegiatan Satlinmas yaitu melaksanakan pelatihan anggota Satlinmas dalam rangka peningkatan Sumber Daya Aparatur yang dilaksanakan di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 395 orang yang masing-masing Kecamatan berjumlah 40 orang. Sedangkan jumlah Satlinmas yang dikukuhkan sebanyak 1875 orang yang terdiri dari Kecamatan Bajuin, Kurau, Bumi Makmur, Takisung, Panyipatan, Batu Ampar, Jorong, Kintap, Pelaihari, Tambang Ulang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.2
Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan dan dilaksanakan pelatihan tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Jumlah peserta
1.	Jorong	11	135
2.	Kintap	14	180
3.	Batu Ampar	14	201
4.	Panyipatan	10	130
5.	Pelaihari	20	440
6.	Bajuin	9	118
7.	Takisung	12	149
8.	Bati-Bati	14	201
9.	Tambang Ulang	9	104
10.	Kurau	11	96
11.	Bumi Makmur	11	121
	Jumlah	135	1875

Sumber: Kasi Perlindungan Masyarakat tahun 2023

1.4 Jumlah PNS

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut maka Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Satpol PP dan Damkar menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Satpol PP dan Damkar menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pembina Utama Muda	1	-	1
Administrator	4	1	5
Pengawas	8	3	11
Analisis	16	-	16
Jabatan Fungsional Umum	5	-	5
Pemula	2	-	2
Jumlah	36	4	40

Sumber: Kasubbag Umpeg

1.5 Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Untuk SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Realisasi Pendapatan Satpol PP dan Damkar menurut Jenis Pendapatan adalah tidak ada / nihil.

1.6 Realisasi belanja menurut jenis belanja

Adapun Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menurut Jenis Belanja yaitu sebesar:

Tabel 1.6.1
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja tahun 2023

No	Jenis Belanja	2023
1.	Belanja Operasi	
	1.1 Belanja Pegawai	5.997.032.349
	1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.036.655.705
	1.3 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.960.376.644
	1.4 Belanja Barang dan Jasa	8.123.956.235
	1.5 Belanja Barang	385.892.582
	1.6 Belanja Jasa	6.276.701.432
	1.7 Belanja Pemeliharaan	737.333.504
	1.8 Belanja Perjalanan Dinas	724.028.717
2.	Belanja Modal	
	2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.820.500
	2.2 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	27.926.000
	2.3 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	101.344.500
	2.4 Belanja Modal Komputer	70.550.000
3.	Jumlah Belanja	
4.	Surplus / Defisit	

Sumber : Kasubbag Keuangan

1.7 Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Untuk SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan adalah tidak ada / nihil.

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

2.1 Penjabaran APBD dalam Rangka Pencapaian Target Tahun 2023

Adapun penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran adalah terdiri dari 3 Program, 9 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan terdiri dari:

Tabel.2.1
Penjabaran APBD dalam Rangka Pencapaian Target Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	
			Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
i.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11.999.544	100	11.145.800	92,88
	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5.999.772	100	5.952.400	99.21
	2. Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5.999.772	100	5.193.400	86.56
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	6.776.890.942	100	6.002.399.549	88,57

1	2	3	4	5	6	7
	3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	6.766.555.914	100	5.997.032.349	88.63
	4. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	10.335.028	100	5.357.200	51.84
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah	499.333.496	100	489.787.286	98,08
	5. Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5.020.620	100	4.372.130	87.08
	6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	123.967.543	100	116.234.246	93.76
	7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8.103.000	100	7.450.000	91.94
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3.262.333	100	3.101.400	95.07
	9. Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	10.000.000	100	10.000.000	100
	10. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	348.980.000	100	348.629.510	99.90

1	2		3	4	5	6	7
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.000.000	100	79.202.555	60.46
	11.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	131.000.000	100	79.202.555	60.46
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	806.704.800	100	788.944.054	97,79
	12.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	34.410.000	100	34.065.000	99.00
	13.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	622.804.800	100	619.674.054	99.50
	14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	149.490.000	100	135.205.000	90.44

1	2	3	4	5	6	7
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
6.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada	6.514.127.258	100	6.199.492.733	95,16
15.	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	787.439.568	100	782.005.000	99.31
16.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	92.560.000	100	90.020.000	97.26
17.	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	690.264.250	100	672.839.000	97.48

1	2		3	4	5	6	7
	18.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	166.212.440	100	137.590.856	82.78
	19.	Peningkatan kapasitas SDM dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	4.777.651.000	100	4.517.037.877	94.55
7.	Kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada	189.265.915	100	179.955.300	95,08
	20.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	57.545.281	100	56.885.000	98.85
	21.	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP	131.720.635	100	123.070.300	93.43

1	2		3	4	5	6	7
8.	Pembinaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada	99.980.828	100	89.775.207	89.79
	22.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan	99.980.828	100	89.775.207	89.79
III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						
9.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahays dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran	532.011.202	100	480.116.600	92.24
	23.	Pencegahan kebakaran dalm daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya	235.254.762	100	184.526.600	78.44
	24.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	296.756.440	100	295.590.000	99.61
	Jumlah			15.561.313.9 86	100	14.320.809.0 48	92,03

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel 3.1
Capaian Kinerja program dan kegiatan sesuai dengan targer kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Kepala Satuan (Eselon II) - Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	- Persentase penuntasan pelanggaran Perda/Perkada - Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum - Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100% 100% 100%	100% 100% 100%
2.	Sekretaris (Eselon III) - Meningkatkan akuntabilitas kinerja	- Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian - Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun - Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan - Nilai SAKIP	100% 100% 100% 82%	100% 100% 100%
3.	Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Eselon III) - Menurunnya Tingkat Pelanggaran Keamanan Ketentraman, Ketertiban Umum	- Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban Umum	100%	100%

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
4.	Kabid Aparatus dan Perlindungan Masyarakat (Eselon III) Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda	- Persentase jumlah SDA Satlinmas yang memiliki sertifikat pengembangan Satlinmas	85%	85%
		- Persentase jumlah SDA yang mengikuti Diklat pengembangan Aparatur	90%	90%
5.	Kabid Penegakan Perda / Perkada (Eselon III) - Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada terkait Ketertiban Umum	- Persentase penegakan Perda dan Perkada terkait Ketertiban Umum	100%	100%
6.	Kabid Damkar (Eselon III) - Meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	- Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana damkar sesuai standar	55%	55%
		- Persentase anggota damkar yang berkualitas	90%	90%

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Trantibum	Satpol PP dan Damkar		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	92,88%			
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dok	99,21%	-	-	-
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	86,56%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	88,57%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48orang	88,63%	-	-	-
				Pelaksanaan penatausahaan dan penguji an / verifikasi keuangan SKPD	5 dok	51,84%	-	-	-

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98,08%			
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 pkt	87,08%	-	-	-
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 pkt	93,76%	-	-	-
				Penyediaan peralatan rumah tangga	11 pkt	91,94%			
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	5 pkt	95,07%	-	-	-
				Penyediaan bahan/material	1 pkt	100%	-	-	-
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	99,90%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60,46%			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30 laporan	60,46%	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97,79%			
				Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	1 Unit	99,00%	- Banyaknya kegiatan yang tak terduga	- Terjadi kekurangan anggaran perlu membuat pengajuan usulan penambahan	
				Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	35 Unit	99,50%	- Banyaknya kegiatan yang tak terduga	- Terjadi kekurangan anggaran perlu membuat pengajuan usulan penambahan	
				Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	3 Unit	90,44%			
				Program Peningkatan Ketentraman dan Keterlibatan Umum					
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan keterlibatan umum dalam 1 Daerah Kab/Kota	100%	95,16%			

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	33 kasus	99,31%	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran untuk kegiatan pengawalan - Kurang edukasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti yang mempekerjakan anak di bawah umur - Sering ditemui adanya back up dari pihak ketiga yang melegal kan kegiatan - Tidak jarang timbul perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut - Meningkatkan patroli/ razia ditempat-tempat yang diduga menjadi sumber kerawanan - Membuka layanan online (reaksi cepat) yang gampang dan mudah diakses oleh masyarakat - Melaksanakan sosialisasi pada setiap pertemuan, rapat atau kegiatan manunggal dan kegiatan lainnya 	
				Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12 kasus	97,26%	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan ini banyak dilapangan dengan melaksanakan razia-razia, yang melibatkan instansi/dinas terkait karena berhubungan dengan SK Tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu di tambah kegiatan honorarium dan makan minum anggota 	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 dok	97,48%	-	-	-
				Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	11 dok	82,78%	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	173 orang	94,55%	-	-	-
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Wakil Kota	100%	95,08%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	98,85%	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda / Perkada - Sarana dan Prasarana belum memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan - Kurangnya SDA PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait Perda / Perkada kepada masyarakat - Perlunya pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan - Untuk tahun 2024 ada 3 orang yang akan melaksanakan diklat PPNS 	-
				Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	93,43%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tinggi angka pelanggaran Perda / Perkada - Kurangnya SDA PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi penanganan atas pelanggaran Perda/ Perkada - Mengikutkan Diklat pembentukan PPNS bagi anggota 	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100	89,79%			
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	4 laporan	89,79%			
				Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
				Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	100	90,24%			

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pencegahan kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota	6 dok	78%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pengetahuan SDM pemadam kebakaran - Tidak semua kecamatan mempunyai Posko Sektor Damkar - Keadaan masyarakat di lokasi yang kadang ingin mengambil alih selang pemadaman sehingga mengganggu aktivitas kelancaran pemadaman - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu diadakan diklat Damkar - Untuk tahun 2024 akan di bangun 3 Posko Sektor Damkar di Kecamatan sehingga penanganan akan lebih cepat - Perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi pemadam kebakaran - Perlu dilakukan sosialisasi / pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran 	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kab/Kota	12 laporan	99,61%			

3.2 Kebijakan Staretegis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kebijakan Staretegis yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1. 2. 3.	Membuat SOP Membuat inovasi kegiatan Membuat Pelayanan secara Online (Facebook : Satpolpp Damkar Kab Tala, IG : satpolpp_tala, WhatsApp : 0821-5138-2018) atau secara Offline yaitu layanan pengaduan baik melalui surat atau datang langsung ke kantor	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Sistem Respon Cepat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut	Mempercepat penanganan dan penyelesaian masalah

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Satpol PP dan Damkar perlu aktif berkoordinasi dengan SKPD lain dalam rangka optimalisasi penegakan Perda khususnya yang terkait terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Bidang Penegakan Perda selalu intens melakukan koordinasi ke dinas teknis yang menangani pendapatan asli daerah (PAD) dan perizinan yaitu Bappeda DPMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut berkontribusi terhadap peningkatan asli daerah - Masalah yang diselesaikan yaitu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan baik internal bidang maupun Bersama dengan stakeholder, eksternal terkait pengawasan penegakan Perda atau Perkada menyangkut rumah makan, pajak hotel, resto, ijin mendirikan bangunan, galian pemanfaat air bawah tanah dll.
2.	Perlunya pemetaan kebutuhan personil Satpol PP dan Damkar, mengingat ada kekosongan terhadap personil Damkar yang di nonaktifkan dan perlu segera diisi kembali karena Damkar menjadi bagian dari urusan pemerintah pelayanan dasar	Segera pengisian PTT yang terkena pemutusan kontrak direncanakan akan diisi oleh relawan pemadam kebakaran sesuai dengan domisili	Tujuannya untuk berkontribusi membantu kegiatan dalam pemadaman kebakaran dan evakuasi penyelamatan yang selama ini mereka tidak dibayar tetapi tetap berkontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat

BAB IV
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Pencapaian kinerja program dan kegiatan merupakan informasi yang diharapkan dapat melalui Laporan ini.

Dari uraian pelaksanaan kegiatan tahun 2023 secara umum program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan masih ada kendala atau masalah yang dihadapi sehingga pencapaian tujuan kurang maksimal.

Demikian Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 ini disampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja, diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya. Terimakasih.

Pelaihari, Januari 2023
Kepala Satuan



LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. TANAH LAUT
JANUARI S/D 31 DESEMBER TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan	Output Dlm DPA	Target Kinerja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/ Kendala	Ket.
					Fisik/Kinerja	%	Keuangan	%			
A	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			8,225,928,782							
I	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11,999,544							
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	5,999,772	4 Dok	100	5,952,400	99.21	47,372		
2	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jlh lap. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5,999,772	6 Laporan	100	5,193,400	86.56	806,372		
II	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,776,890,942							
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jlh orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	6,766,555,914	40 Orang	88.63	5,997,032,349	88.63	769,523,565		
4	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dok	10,335,028	5 Dok	100	5,357,200	51.84	4,977,828	Sisa pagu anggaran pada jasa transaksi keuangan	
III	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			499,333,496							
5	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jlh paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	5,020,620	1 Paket	100	4,372,130	87	648,490		
6	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jlh paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	123,967,543	6 Paket	100	116,234,246	93.76	7,733,297		
7	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jlh paket peralatan rumah tangga yang disediakan	11 Paket	8,103,000	11 Paket	100	7,450,000	91.94	653,000		
8	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jlh paker barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	3,262,333	5 Paket	100	3,101,400	95	160,933		

No.	Program/Kegiatan	Output Dim DPA	Target Kinerja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/ Kendala	Ket.	
					Fisik/Kinerja	%	Keuangan				
9	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material	Jlh paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	10,000,000	1	Paket	100	10,000,000	100	-	
10	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jlh laporan Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	348,980,000	50	Laporan	100	348,629,510	99.90	350,490	
IV	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			131,000,000							
11	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jlh Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	36 Laporan	131,000,000	36	Laporan	100	79,202,555	60.46	51,797,445	
V	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			806,704,800							
12	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jlh kendr. Perorangan dinas atau kendrn dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	34,410,000	1	Unit	100	34,065,000	99.00	345,000	
13	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jlh kendr. dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 Unit	622,804,800	35	Unit	100	619,674,054	99.50	3,130,746	
14	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jlh gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	149,490,000	3	Unit	100	135,205,000	90	14,285,000	

No.	Program/Kegiatan	Output Dim DPA	Target Kinerja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/ Kendala	Ket.
					Fisik/Kinerja		%	Keuangan			
B	Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			6,803,374,002							
VI	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			6,514,127,258							
15	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini , Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jlh kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yg dicegah Melalui Deteksi Dini , Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	33 Kasus	787,439,568	33	Kasus	100	782,005,000	99	5,434,568	
16	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jlh kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	12 Kasus	92,560,000	12	Kasus	100	90,020,000	97.26	2,540,000	
17	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jlh Dokumen hasil pelaks Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.00 Dok	690,264,250.00	1	Dok	100.00	672,839,000	97	17,425,250	52 laporan

No.	Program/Kegiatan	Output Dlm DPA	Target Kinerja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/ Kendala	Ket.
					Fisik/Kinerja		%	Keuangan			
18	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jlh Dokumen yg memuat hasilPemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	11 Dok	166,212,440	11	Dok	100.00	137,590,856	82.78	28,621,584	
19	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jlh SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkn kapasitasnya	173 Orang	4,777,651,000	94,55	Orang	100.00	4,517,037,877	94.55	260,613,123	
VII	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			189,265,916							
20	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jlh lap hasil pelaks pengawasan yg dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	12 Laporan	57,545,281	12	Laporan	100.00	56,885,000	98.85	660,281	
21	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jlh lap pelaks penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan yg dpt ditangani sesuai SOP	12 Laporan	131,720,635	12	Laporan	100.00	123,070,300	93.43	8,650,335	
VIII	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			99,980,828							

No.	Program/Kegiatan	Output Dim DPA	Target Kinerja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/ Kendala	Ket.
					Fisik/Kinerja	%	Keuangan			
22	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jlh lap hasil pelaks peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dlm mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan	99,980,828	3 Laporan	90	89,775,207	90	10,205,621	
C	Program : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun			532,011,202						
IX	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota			532,011,202						
23	Sub Kegiatan : Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jlh dok NSPM pencegahan/penanggulan gan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	6 Dok	235,254,762	6 Dok	100.00	184,526,600	78	50,728,162	
24	Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jlh lap hasil pelaks keg kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	12 Laporan	296,756,440	12 Laporan	100.00	295,590,000	99.61	1,166,440	714 Laporan
	JUMLAH			15,561,313,986		99,58	14,320,809,084	92.03	1,240,504,902	

